



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 04 Januari 2018

Halaman: 2

PEMBAHASAN RAPERDA PERPARKIRAN DIKEBUT

Walikota Dukung Tarif

Batas Atas

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta siap memenuhi panggilan DPRD setempat untuk evaluasi terkait maraknya pelanggaran parkir selama libur akhir tahun. Adanya batas atas tarif parkir pada saat situasi kepadatan tertentu diwacanakan untuk mengantisipasi kenaikan tarif parkir tak berdasar atau *nuthuk*.

"Kami siap jelaskan dan koordinasi dengan dewan supaya pelanggaran tarif parkir tidak berulang," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti saat diminta tanggapan terkait dewan yang menyorozi pelanggaran parkir, Rabu (3/1).

Dia berharap ada semacam batas atas tarif parkir kondisi kepadatan tertentu. Misalnya saat liburan, Yogyakarta dipastikan padat kendaraan baik bus maupun kendaraan pribadi. Batas atas tarif parkir itu yang

ditetapkan memiliki dasar yang jelas dan besarnya tidak boleh terlalu tinggi.

"Harapannya ada batas atas tarif parkir. Tentu besarnya tidak seperti kejadian saat libur akhir tahun kemarin," ujarnya.

Ditambahkan, evaluasi bersama dewan itu juga dapat menjadi masukan kepada dewan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) perpajakan. Terutama agar perda dapat mengatur dan menjaga ketika situasi normal dan



Haryadi Suyuti

saat kepadatan tertentu. Sementara itu Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Perpajakan DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardianto menyatakan, pihaknya akan memasukkan klausul yang lebih

tegas untuk meniadakan pelanggaran parkir dalam raperda perpajakan. Klausul itu agar memberikan efek jera sehingga pelanggaran parkir tidak terulang.

"Saat ini raperda perpajakan masih dibahas dan pasti itu akan kita masukkan. Misalnya pencabutan surat tugas bagi juru parkir resmi dan denda atau kurungan maksimal bagi juru parkir tidak resmi," tutur Fokki.

Dia menyebut dalam raperda perpajakan juga akan ada rencana menaikkan tarif parkir karena pertimbangan hukum ekonomi. Kenaikan tarif parkir itu juga akan dikompensasikan dengan menata sistem transportasi.

Sebelumnya Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko berpendapat maraknya pelanggaran parkir itu harus disikapi Pansus Raperda Perpajakan yang kini belum menyelesaikan perda. Terutama untuk penindakan pelanggaran parkir harus ada klausul yang tegas agar jera. Di samping itu juga dimungkinkan adanya tarif parkir khusus saat liburan untuk menghindari tarif parkir yang *nuthuk*.

"Raperda perpajakan ke depan harus dapat lebih tegas. Kalau mau naik tarifnya saat liburan, bisa juga diatur dengan dasar yang jelas. Misalnya karena butuh ekstra tenaga dan pengawasan karena banyak wisatawan. Tapi dengan tarif yang terjangkau misalnya tarif parkir motor biasanya Rp 1.000 selama libur naik jadi Rp 3.000," ujar Sujanarko. (Tri)-m

1.

2.

3.

4.

5.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005